

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kementerian Perhubungan, yang pada masa awal kemerdekaan dikenal sebagai Departemen Perhubungan, terbentuk melalui penggabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum di bawah kepemimpinan Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Meskipun demikian, penggabungan tersebut tidak bertahan lama, karena kedua bidang tersebut akhirnya ditangani oleh menteri yang berbeda, yakni Ir. Abdulkarim sebagai Menteri Perhubungan dan Ir. Putuhena sebagai Menteri Pekerjaan Umum.



Gambar 2.1. Struktur organisasi Kementerian Perhubungan

Sumber: [?]

Pada periode antara awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki lingkup tanggung jawab yang sangat luas, mencakup sektor perhubungan darat, laut, udara, perkeretaapian, serta layanan pos, telegraf, dan telekomunikasi, yang masing-masing dikelola oleh jawatan-jawatan khusus. Selama agresi militer Belanda pada tahun 1948, Dinas Telegraf berperan krusial dalam menjaga kelangsungan roda pemerintahan dengan mengirimkan mandat dari Presiden Soekarno kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Pada era Demokrasi Liberal, kelembagaan Departemen Perhubungan mengalami perubahan dengan dibentuknya Departemen Perhubungan Laut secara terpisah. Di bawah kepemimpinan Ir. Djuanda, pemerintah juga mendirikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) pada tahun 1952 sebagai bentuk penguatan sektor pelayaran nasional. Perubahan struktural yang lebih besar terjadi pada

era Demokrasi Terpimpin melalui Keputusan Presiden No. 153 Tahun 1959 yang membentuk Kabinet Kerja I, menggantikan Departemen Perhubungan dengan Kementerian Distribusi. Dalam periode ini, urusan perhubungan tersebar ke dalam beberapa departemen, seperti Departemen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, serta Departemen Pos dan Telekomunikasi.

Masa pemerintahan Orde Baru menandai penyatuan kembali urusan perhubungan ke dalam satu departemen. Dalam struktur Kabinet Pembangunan I hingga III, Departemen Perhubungan membawahi berbagai direktorat jenderal, termasuk Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, serta Pos dan Telekomunikasi. Lembaga Meteorologi dan Geofisika yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Perhubungan Udara juga akhirnya dipindahkan langsung ke Departemen Perhubungan pada tahun 1973.

Melalui berbagai dinamika dan penyesuaian kelembagaan sejak 1945, Kementerian Perhubungan terus mengalami pembenahan dan konsolidasi, hingga menjadi salah satu kementerian teknis yang besar dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor transportasi dan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden.”

Misi

1. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja;
2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi (TIK) yang mutakhir;
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan;
4. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan udara;
5. Terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan dan kompetensi;

6. Meningkatnya peran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada organisasi penerbangan sipil internasional dan/atau lembaga internasional lainnya.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Adapun tugas pokok dari bagian-bagian yang ada di Sekretariat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

Bagian ini memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana kerja, merancang program strategis, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Selain itu, pengelolaan teknologi informasi juga merupakan bagian dari tugas utama Bagian Perencanaan, mengingat sistem informasi dan *dashboard* digital sangat dibutuhkan untuk mendukung proses perencanaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

Contoh implementasinya adalah pengembangan *Website Dashboard Pimpinan*, yang merupakan bagian dari transformasi digital organisasi.

b. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi keuangan, yang mencakup:

- Penyusunan laporan keuangan,
- Pengaturan sistem akuntansi dan perbendaharaan,
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta
- Pengumpulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bagian ini memastikan setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan regulasi keuangan pemerintah. Akurasi dan transparansi menjadi kunci utama dalam operasionalnya.

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum menangani:

- Penyusunan dan evaluasi regulasi peraturan perundang-undangan,
- Pemberian advokasi hukum kepada instansi yang membutuhkan, dan
- Penegakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagian ini menjadi lini terdepan dalam memastikan seluruh aktivitas Direktorat sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

d. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Fokus utama bagian ini adalah pengelolaan:

- Perencanaan dan mutasi pegawai,
- Pengembangan kompetensi SDM,
- Evaluasi jabatan dan kinerja pegawai,
- Penataan organisasi dan tata laksana.

Bagian ini memastikan seluruh personel bekerja sesuai struktur yang efisien, terorganisir, dan terus berkembang dalam mendukung kinerja kelembagaan.

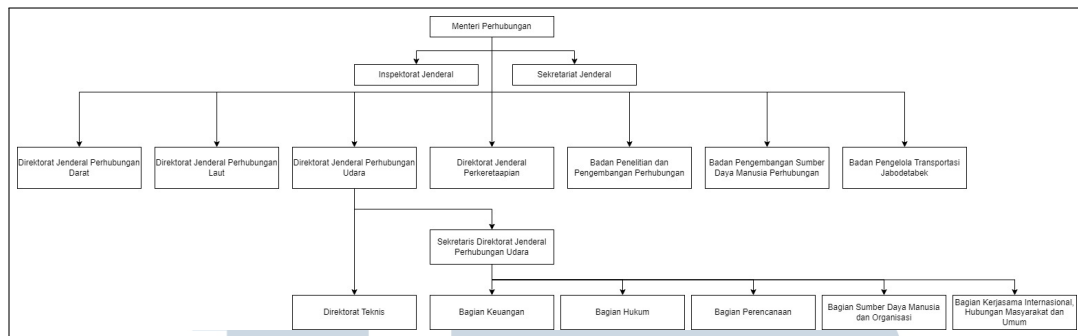
e. Bagian Kerja Sama Internasional, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Bagian ini memiliki tiga peran penting, yaitu:

Kerja Sama Internasional: menjalin relasi dan kerja sama dengan pihak asing, lembaga internasional, dan negara lain dalam sektor transportasi udara.

Hubungan Masyarakat (Humas): mengelola komunikasi publik, pemberitaan, serta menjaga citra positif institusi.

Umum: menyelenggarakan layanan administrasi umum, kesekretariatan, dan logistik yang mendukung operasional harian.



Gambar 2.2. Struktur organisasi Kementerian Perhubungan

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA